ANALISIS PELANGGARAN HUMAN SECURITY PEMERINTAH MESIR TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN PERIODE GAMAL ABDUL NASER & ANWAR SADAT (1954-1981)

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

MOH. ALI HUSEN SANI S.ZUHRI

17323068

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

ANALISIS PELANGGARAN HUMAN SECURITY PEMERINTAH MESIR TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN PERIODE GAMAL ABDUL NASER & ANWAR SADAT (1954-1981)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

MOH. ALI HUSEN SANI S.ZUHRI

17323068

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PELANGGARAN HUMAN SECURITY PEMERINTAH MESIR TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN PERIODE GAMAL ABDUL NASER & ANWAR SADAT (1954-1981)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
29 Agustus 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
2	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	
3	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	

3

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024



MOH. ALI HUSEN SANI S.ZUHRI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
DAFTAR ISI v
ABSTRAK 7
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 1
1.2 44
1.3 44
1.4 55
1.5 56
1.6 78
1.7 1010
1.8 1111
1.8.1 1111
1.8.2 1111
1.8.3 1212
1.8.4 1212
1.9 1213
BAB 2 Dinamika dan Sejarah Gerakan IM di Mesir 14
2.1. Sejarah Gerakan Ikhwanul Muslimin 14
2.2. Konsep dan Karakteristik Ikhwanul Muslimin 17
2.3. Respon Pemerintah Terhadap Gerakan Ikhwanul Muslimin 21
BAB 3 Analisis Pelanggaran Human Security Pemerintah Mesir Terhadap Ikhwanul Muslimin 26
3.1. analisis pelanggaran Human Security Era Gamal Abdul Nasser Terhadap Ikhwanul Muslimin (1954-1970)2626
3.1.1 keamanan ekonomi 26
3.1.2 keamanan ekonomi 27
3.2. Analisis Pelanggaran Human Security Era Anwar Sadat Terhadap Ikhwanul Muslimin (1970-1981) 28
3.2.1 keamanan ekonomi 28
3.2.2 keamanan komunitas 29
3.2.3 keamanan pribadi 30

3.2.4 keamanan politik 30
BAB 4 PENUTUP 32
2.1. Kesimpulan 32
2.2 Rekomendasi 33
DAFTAR PUSTAKA 34

ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Mesir merupakan konflik antar pemerintah dan sebuah kelompok islam di Mesir atas ketidaksetujuan kelompok ikhwanul muslimin. Konflik ini terjadi pada era Nasser dan Anwar Sadat. Dan melibatkan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Israel dan Inggris. Upaya ikhwanul muslimin dalam memperjuangkan Mesir menjadi negara islam mendapat tantangan yang kuat yaitu dari pemerintah Mesir itu sendiri. United Nations Development Programme (UNDP) menjadi salah satu dasar untuk mengkaji Human Security dalam menyelesaikan penelitian ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan pemerintah Mesir terhadap kelompok ikhwanul Muslimin seperti memenjarakan tokoh-tokoh besar IM dan membunuhnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji lebih jauh terkait bagaimana awal mula terjadinya konflik ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada dua era yaitu Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.

Keywords: United States, UNDP, Mesir, IM, england, Israel

ABSTRACT

The conflict that occurred in Egypt was a conflict between the government and an Islamic group in Egypt due to the disagreement of the Muslim Brotherhood group. This conflict occurred during the era of Nasser and Anwar Sadat. And involving western countries such as the United States, Israel and England. The Muslim Brotherhood's efforts to fight for Egypt to become an Islamic state have faced strong challenges, namely from the Egyptian government itself. The United Nations Development Program (UNDP) is one of the bases for studying Human Security in completing this research. Several violations were committed by the Egyptian government against the Muslim Brotherhood group, such as imprisoning big IM figures and killing them. The aim of the research is to examine further how this conflict began until the end of the term of office in two eras, namely Gamal Abdul Nasser and Anwar Sadat.

Keywords: United States, UNDP, Mesir, IM, england, Israel

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikhwanul Muslimin dalam bahasa arab yaitu Al Ikhwan Al-Muslimin atau secara singkat yaitu Al-Ikhwan dalam bahasa arab melayu yaitu saudara semuslim atau dalam bahasa inggris yaitu Muslim Brotherhood, merupakan suatu gerakan berdasarkan ideology Islam yang jaringannya berskala antar bangsa yang mempunyai pengaruh di negara-negara di dunia. Ikhwanul Muslimin yang nantinya disebut IM , merupakan gerakan islamis tertua di dunia dan juga sejak lama sebagai kelompok oposisi terbesar di Mesir.

Setiap umat muslim di dunia memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecintaannya terhadap agama Islam. Ikhwanul Muslimin yang merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1928 memiliki tujuan yang memberikan nilai positif dalam penyebaran dan pengenalan agama Islam. Tokoh Hasan Al Banna sebagai pemimpin Organisasi berhasil menjadikan Ikhwanul Muslimin yang pada awalnya hanya merupakan organisasi kecil, kemudian berkembang menjadi kelompok gerakan yang besar dalam hitungan beberapa tahun saja. Ikhwanul Muslimin dalam pergerakannya menunjukkan gerakan yang sangat fenomenal di kawasan Timur Tengah. Berdiri dimulai dari Mesir lalu menyebar ke Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait dan negara-negara teluk lainnya, sehingga membentuk gerakan Islam Pan-Arab.

Namun tak sedikit pejuang Ikhwanul Muslimin berakhir dalam penjara. keterlibatan peranan Ikhwanul Muslimin dalm pergerakan politik Mesir, menjadikan pemerintah Mesir merasa terancam sehingga pergerakannya

mendapatkan sorotan penjagaan penuh. walau organisasi ini sempat dikecam dan dibekukan, akan tetapi perlu diketahui bahwa jumlah Ikhwanul Muslimin terus menemukan caranya untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar lagi hingga saat ini.

ketika berbicara soal politik dan hubungannya dengan ikhwanul Muslimin, patut untuk ditegaskan bahwa kekuasaan bukan menjadi sasaran utama kelompok ini . Tujuan utama mereka adalah untuk mewujudkan sistem islami, kapanpun sistem ini terwujud dan siapapun orang yang mewujudkannya, Ikhwanul Muslimin siap menjadi prajurit dan pendukungnya. sejalan dengan tujuannya, cara pandang Ikhwanul Muslimin terhadap Islam tidaklah sederhana, karena menurut mereka Islam adalah "The Way Of Life" (jalan kehidupan) dan Islam merupakan ideologi yang menyuruh untuk kehidupan pribadi ataupun kehidupan masyarakat.

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah kelompok pemuda atau organisasi pemuda yang terbentuk pada Maret 1928 jamaah Ikhwanul Muslimin sendiri berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan Hasan Al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya yaitu : Hafizh Abdul Hamid, Ahmad Al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki Al-Maghribi. Perkembangan Ikhwanul Muslimin di Ismailiyah sangat pesat dan sudah menembus beberapa kota di Ismailiyah seperti: Syubrakhit, Mahmudiyah, Abu Syuwair, Port Said, Bahr Shaghir, Suez dan Balah.

Pada tahun 1933, yang mana telah memiliki sepak terjang yang sangat banyak. Dalam perjalanannya Ikhwanul Muslimin mendapatkan banyak tanggapan baik dari masyarakat hingga tanggapan keras dan negatif dari

pemerintahan Mesir dikarenakan dianggap dapat mengancam kekuasaan penguasa untuk saat itu. Mereka berseteru dengan pemerintahan dikarenakan rencana pemerintahan ingin memisahkan politik dan agama yang mana Ikhwanul Muslimin tidak setuju akan hal tersebut dikarenakan Kelompok Ikhwanul Muslimin menginginkan segala urusan bernegara harus sesuai dengan syari'at Islam dan mereka juga menentang masuknya paham yang dibawa Amerika Serikat. Ikhwanul Muslimin adalah satu-satunya Organisasi yang besar dan berpengaruh di Mesir yang mana pergerakan yang mereka lakukan bukan hanya untuk diri dan organisasi sendiri tapi juga untuk negara.

Kebanyakan kerusuhan yang terjadi di negara Mesir dituduh bahwa itu semua adalah perbuatan kelompok Ikhwanul muslimin seperti pembunuhan kepada Anwar Sadat, upaya dan percobaan pembunuhan kepada Abdul Nasser yang juga dituduh dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin serta banyak nya bentrokan yang terjadi antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah Mesir dikarenakan terlalu krisis nya Kelompok Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintahan Mesir. Dalam perjalan gerakan yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin ini juga sempat dianggap Illegal di Mesir sendiri dan sempat dibubarkan juga oleh Nuqrasyi Pasha pada tanggal 8 November 1948.

kelompok Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir ini adalah sebuah kelompok atau organisasi yang awalnya bertujuan dakwah dan mendirikan syariat agama yang mana awalnya mereka melakukan pergerakan dengan sendirinya dan tanpa sangkut paut dengan pemerintahan Mesir yang mana sedikit banyak nya dapat dicocokkan dengan Front Pembela Islam yang berada di Indonesia, tetapi

kemudian menjadi gerakan politik. Di Mesir terutama, gerakan ini berjuang melawan kolonial Inggris dan memberantas semua pengaruh dari Barat. Pada akhirnya dikarenakan mereka terlalu kritis terhadap pemerintahan Mesir maka pemerintahan Mesir menganggap mereka sebagai ancaman. Hal ini dikarenakan pergerakan – pergerakan yang mereka lakukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Mesir seperti bentrokan yang terjadi antara kelompok Ikhwanul Muslimin ini terhadap pemerintahan Mesir pada masa kediktatoran yang terjadi pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser dan lain sebagainnya. Pemerintah Mesir kemudian membubarkan kelompok ini pada akhir 1948 karena tuduhan menyerang target-target Inggris dan Yahudi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelanggaran Human Security yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat kepada Ikhwanul Muslimin (1954-1981) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bentuk peranan yang dilakukan Hasan Al-Banna dalam mengembangkan Ikhwanul Muslimin di Mesir
2. Untuk mengetahui kenapa pemerintah Mesir di Timor Tengah menganggap organisasi Ikhwanul Muslimin ini sebagai kelompok teroris
3. Untuk mengetahui dinamika gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintah Mesir, serta tindakan pemerintah Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin dalam konsep *Human Security*.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian terkait permasalahan political security di Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin ini terjadi pada tanggal 8 November 1948. Ikhkwanul Muslimin ikut membantu dalam perang melawan Israel di Palestina, hal tersebut membuat kekhawatiran pemerintah akan kekuatan kelompok Ikhwanul Muslimin sehingga pemerintah Mesir berupaya untuk membubarkan organisasi tersebut. Tetapi pada tahun Pada tahun 1965-1966, terulang kembali bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah Mesir, karena kediktatoran pemerintah. Hal ini membuat pemerintah Mesir menggulingkan ribuan anggota Ikhwanul Muslimin untuk dipenjarakan bahkan ada yang dihukum mati karena takut akan menjadi problem yang besar bagi negara Mesir. Ikhwanul Muslimin hanya menginginkan peraturan agama dan politik itu bisa menjadi saling mengikat satu sama lain.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada tahun 1948 Ikhwanul Muslimin ikut membantu dalam perang melawan Israel di Palestina, hal tersebut membuat kekhawatiran pemerintah akan kekuatan kelompok Ikhwanul Muslimin. Sehingga Nuqrasyi Pasha (1948) mengeluarkan keputusan untuk membubarkan kelompok Ikhwanul Muslimin pada tanggal 8 November 1948. Pada tahun 1965-1966, terulang kembali bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah, karena kediktatoran pemerintah.

Dimana kondisi ini berlangsung sampai wafatnya presiden Gamal Abdul Nasser pada tahun 1970. Anwar Sadat menduduki kepresidenan pada tahun 1970, dimana Anwar Sadat membebaskan para tahanan termasuk dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang saat itu dipimpin oleh Umar Tilmisani. Menurut gosip yang beredar saat itu bahwa tujuan Anwar Sadat yaitu untuk memerangi saingan politik yang berasal dari golongan pengikut Gamal Abdul Nasser. Kebebasan mulai hilang ketika Mesir melakukan perundingan-perundingan dengan Israel pada tahun 1977, dimana Menachem Begin Perdana Menteri Israel mengundang Anwar Sadat untuk menghadiri undangan perdamaian antara Israel dan Mesir. Kemudian terjadi kembali pembunuhan Presiden Anwar Sadat, dan Ikhwanul Muslimin dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dimasa Mubarak, aktivitas kelompok Ikhwanul Muslimin tidak berbeda dari sebelumnya. Pada tahun 2005, Ikhwanul Muslimin mencoba memperkenalkan kembali organisasinya pada masyarakat dengan mengangkat isu diskriminasi para penganut Kristen di Mesir. Pada saat itu para anggota Ikhwanul Muslimin meluncurkan sebuah *website* berbahasa Inggris dimana ide tersebut bertujuan untuk mencari dukungan khususnya pada orang-orang Barat, dimana Mesir begitu dikekang oleh pemerintahannya sendiri. Pemerintah Mesir melihat hal ini sebagai ancaman bagi pemerintahannya, maka pemerintah mengamandemen untuk mencabut Islam sebagai agama negara. Hal tersebut otomatis membuat anggota Ikhwanul Muslimin secara otomatis memilih keluar dari kursi parlemen ketimbang harus memilih voting setuju atau tidaknya terhadap amandemen tersebut. Dan pada tahun 2006-2008 Ikhwanul Muslimin kembali diboikot khususnya dalam kursi

parlemen, bagi para anggota Ikhwanul Muslimin yang dianggap agresif dipenjarakan, dan sisanya dalam pengawasan pemerintah yang ketat.

Pemerintah Mesir sangat ketat terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin ini karena menganggap bahwa organisasi ini bisa saja mengancam keamanan negara dan rakyat sipil. Para wewenang Mesir juga pernah mengeksekusi mati beberapa anggota Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Jaksa Hisham Barakat ketika sedang berkendaraan ke Kairo. Pada Tahun 1965-1966 M, terjadi bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah, karena pemerintah sering melakukan penahanan dan penganiayaan. Bahkan tiga orang aktivis Ikhwanul Muslimin dijatuhi hukuman mati. Ketegangan ini pun terus berlanjut hingga tahun ketahun, dengan demikian semakin banyaknya konflik antara Pemerintah dan Ikhwanul Muslimin yang terjadi, Sehingga pada tahun 2013, Gerakan Ikhwanul Muslimin dilarang dan dicap sebagai kelompok teroris oleh Pemerintah Mesir. Satu bulan setelah Morsi digulingkan, banyak hukuman mati dijatuhkan di persidangan massal yang melibatkan ratusan terdakwa dan hanya berlangsung beberapa hari saja.

1.6 Kerangka Pemikiran

Keamanan manusia pada tahun belakangan ini menjadi permasalahan yang serius di kalangan negara-negara salah satunya ialah Mesir. Adanya permasalahan internal antara pemerintah Mesir dengan kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi

sebuah ancaman keamanan bagi negara tersebut, dikarenakan akan berdampak pada ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan yang lainnya. Hal ini pun masih kerap terjadi di Mesir konflik antara pemerintah negara dengan kelompok ikhwanul Muslimin.

Kelompok Ikhwanul Muslimin ini kerap menjadi penghalang bagi pemerintah Mesir dikarenakan seringkali melakukan perlawanan kepada pemerintah Mesir salah satunya pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Dimana pada masa pemerintahannya, ia sangat menentang dengan cara-cara yang dilakukan kelompok Ikhwanul Muslimin ini. Sehingga seringkali timbul perselisihan antara keduanya.

Hal inilah yang menjadikan beberapa pemimpin Mesir melakukan perlawanan dan tidak setuju adanya kelompok Ikhwanul Muslimin berada di Mesir. Akan tetapi kelompok IM ini terus menyebar luas di kalangan berbagai negara salah satunya di Arab dan banyak negara-negara Islam lainnya.

Dalam menganalisis skripsi ini juga saya menggunakan konsep human security sebagai salah satu gagasan dimana keamanan manusia tidak hanya berlaku untuk melindungi negara namun juga melindungi manusia secara individu. Human security melakukan sebuah upaya pengalihan perhatian dari keamanan negara menjadi keamanan individu.

United Nations Development Programme (UNDP) membagi *Human Security* menjadi tujuh bagian diantaranya adalah *health security* (keamanan kesehatan), *economic security* (keamanan ekonomi), *food security* (keamanan pangan), *environmental security* (keamanan lingkungan), *community security*

(keamanan komunitas), *political security* (keamanan politik), *personal security* (keamanan pribadi). Setelah perang dingin usai, UNDP menyatakan bahwa masalah keamanan bukan saja tentang militer dan perang akan tetapi juga menyangkut masalah kehidupan yang tercantum dalam tujuh bagian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis. (Persaud, 2013)

Economic security (keamanan ekonomi) : ancamannya berupa kemiskinan, pendapatan yang tidak tercukupi, dan pengangguran. *Health security* (keamanan kesehatan) : ancaman yang berupa wabah penyakit dan akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari keamanan kesehatan ialah untuk mencegah terjadinya kematian manusia, terutama yang disebabkan oleh penyakit. *Food security* (keamanan makanan) : yang dapat mengancam keamanan ini adalah kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan makanan, dan kurangnya akses untuk mendapatkan makanan. *Environmental security* (keamanan lingkungan) : ancaman ini antara lain adalah polusi, penebangan hutan, ketiadaan sumber daya alam, dan bencana alam. *Community security* (keamanan komunitas) : ancamannya antara lain adalah kegiatan atau aktivitas-aktivitas tradisional yang memaksa, perlakuan kasar terhadap kaum perempuan, diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama atau kelompok masyarakat tertentu, pemberontak dan konflik bersenjata. *Political security* (keamanan politik) : mengatasi ancaman berupa tekanan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kediktatoran militer, pembantaian, dan juga ketidakadilan. *Personal security* (keamanan pribadi) : yang menjadi ancaman adalah perasaan takut, dalam hal ini takut akan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman, kemudian ancaman berupa serangan dari negara lain seperti peperangan, ancaman

dari terorisme internasional ataupun dari kelompok lain seperti pada konflik etnis dan konflik religius, ancaman dari individu atau sekelompok orang, kejahatan di jalan, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan berupa kekerasan domestik, penyiksaan dan pemerkosaan, kekerasan terhadap anak-anak seperti penyiksaan terhadap anak, pelacuran anak serta ancaman seperti bunuh diri hingga ancaman dari narkoba.

1.7 Argumen Sementara

Jika kita lihat dari rumusan masalah yang tercantum diatas bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Mesir terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin. Seperti pembunuhan yang dilakukan kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Hal ini akan mengakibatkan ancaman keamanan politik, keamanan komunitas, keamanan ekonomi, dan lain-lain. Negara Mesir akan mendapatkan ancaman dari dalam negaranya sendiri dan kemungkinan besar juga dari negara luar. Adapun ancaman yang akan terjadi seperti merasa ketakutan atau terintimidasi akan serangan dari eksternal. Pemerintah Mesir melakukan perlawanan terhadap kelompok ikhwanul muslimin diakibatkan ikhwanul muslimin ingin melihat negara Mesir menjadi negara yang mayoritas muslim dan menentang kerjasama pemerintah Mesir dengan negara Barat. Sehingga terjadilah konflik perang antara Pemerintah Mesir dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang didirikan pertama kali oleh Hasan Al Banna.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Disini saya mencoba untuk menggunakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek secara tepat. Dimana teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana respon Ikhwanul Muslimin pasca kudeta Mursi di Mesir. Deskriptif itu sendiri merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari permasalahan pemerintah Mesir kepada kelompok Ikhwanul Muslimin ini merupakan rezim militer terkait permasalahan-permasalahan yang timbul antara pemerintah Mesir dan IM seperti halnya tidak setujunya kelompok Ikhwanul Muslimin terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Mesir, yang pada akhirnya kelompok IM melakukan tindakan kekerasan terhadap para pemerintahnya. Akan tetapi pemerintah Mesir tidak tinggal diam terhadap perlakuan tersebut sehingga melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota IM dan dipenjarakan sebagian juga diberikan hukuman mati. Hasan Al Banna sebagai pembentuk gerakan ini tidak tinggal diam terhadap perlakuan presiden Mesir dan merencanakan pembunuhan terhadap presiden Mesir.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Saya menggunakan sumber data berupa sumber pustaka dan referensi lain seperti: buku, jurnal, berita, laporan penelitian berupa skripsi atau tesis, dan sumber-sumber lain dari internet. Hasil dari data-data yang terkumpul oleh penulis kemudian dikelola dan menjadi bahan analisa kasus sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Didalam proses pengumpulan data itu sendiri banyak kendala-kendala yang saya alami seperti halnya bagaimana menentukan sebuah rumusan masalah, latar belakang, dan sebagainya itu membutuhkan proses/waktu yang cukup lama dan mengulas kembali letak benar dan salahnya dalam melakukan sebuah analisa ataupun penelitian yang diambil.

1.9 Sistematika Pembahasan

penelitian yang dilakukan akan mengkaji 4 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan, dan yang terakhir adalah penutup. unsur-unsur yang menjadi pedoman penyusunan skripsi ini dibahas pada bab pendahuluan. Bab pendahuluan dibuka dengan latar belakang permasalahan, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan ruang lingkup, signifikansi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metodologi dan sistematika pembahasan, dimana disini dirangkum dalam bab pertama.

Bab yang kedua menjelaskan mengenai respon pemerintah Mesir terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. pada bab ini juga dijelaskan tentang dimana letak bangkitnya ikhwanul muslimin itu sendiri. dijelaskan juga terkait bagaimana pemikiran kelompok ikhwanul muslimin Mesir dan Radikalisme Islam.

bab ketiga memberikan penjelasan mengenai analisis pelanggaran Human Security pada era Gamal Abdul Nasser dan Era Anwar Sadat dari tahun 1954-1981). bab ini mengkaji terkait keamanan-keamanan yang terjadi di Mesir selama dua periode tersebut. salah satunya seperti keamanan ekonomi Mesir pada saat Era Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.

BAB 2

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR

2.1. Sejarah Gerakan Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu gerakan social yang didirikan di Mesir. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hassan Al-Banna dipandang oleh beberapa penulis barat sebagai perkembangan yang menyampaikan isu-isu legislatif fundamentalisme Islam, yang merupakan perkembangan yang menegaskan kembali komitmen untuk mendirikan Negara Islam dan menolak untuk dampak sosial, politik, dan keuangan barat. Ikhwanul Muslimin juga memutuskan untuk mempolitisasi agama, sangat memaksa terhadap non-Muslim sekaligus Muslim yang menganut cara hidup barat, mempraktikkan kebrutalan dalam melakukan tujuan politiknya, meragukan penguasa, dan melatih administrasi penuh misteri dalam mencapai tujuan masalah legislatif. Kesan politik fundamentalisme Ikhwanul Muslimin semakin meluas didukung oleh kegiatan yang cukup besar, khususnya kekalahan yang menguntungkan Pemerintah Mesir Inggris pada tahun 1952. Tidak berhenti sampai di situ, Ikhwanul Muslimin juga telah mengirimkan relawan jihad ke Palestina. tahun lalu 1947 untuk membantu pertempuran individu Palestina melawan zionisme Yahudi. Cap fundamentalisme juga cenderung pada sistem Gamal Abdul Nasser yang berkuasa saat itu sehingga ia memasukkan Ikhwanul Muslimin sebagai individu dari perkumpulan terlarang Persaudaraan Muslim, bahkan para pemimpinnya ditahan, disiksa, dan dieksekusi.

Sesuai dengan pandangan IM yang luas tentang Islam, kelompok ini memiliki berbagai latihan di bidang persekolahan yang bergantung pada kesepakatan Islam, seperti pengajaran filosofis (at-Tarbiyah al-Aqaidiyyah), pelatihan mendalam (at-Tarbiyah al-Ruhaniyah), pelatihan moral (at-Tarbiyah al-Ruhaniyah), dan pembinaan akhlak (at-Tarbiyah al-Ruhaniyah). Tarbiyah al-Khuluqiyah), pendidikan sosial (at-Tarbiyah al-Ijtimaiyyah), pendidikan ilmiah (at-Tarbiyah al-Aqliyyah), pendidikan politik (at-Tarbiyah al-Siyasah) dan sekolah olahraga (at-Tarbiyah al-jismiyah).

Ikhwanul Muslimin sedang berusaha untuk membuang sekularisme dan mengembalikan Mesir kepada Al-Qur'an sebagai aturan fundamental untuk standar kehidupan dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah Mesir, dengan standar IM yaitu : *"Allah is our objective, The Prophet is our Leader, Qur'an is our law, Jihad is our way, dying in the way of Allah is our highest hope".*

Pada awal pembentukan kelompok Ikhwanul Muslimin, ia tampil dengan bentuk organisasi keagamaan, social dan kemasyarakatan. Ikhwanul Muslimin juga focus pada gerakan organisasi perluasan rekrutmen keanggotaan, diskusi-diskusi mengenai dakwah, perbaikan moral dan keagamaan masyarakat dan juga menjadi organisasi yang melakukan pelayanan social pada masyarakat. Aktivitas-aktivitas Ikhwanul Muslimin mulai memasuki ranah politik pada akhir tahun 1930-an.

Pemahaman terhadap masalah legislatif sebagaimana ditunjukkan oleh Ikhwanul Muslimin diidentikkan dengan pemerintah sejauh administrasi, kewajiban dan kapasitasnya, seluk-beluk hak dan komitmen, serta pengawasan

dan komando terhadap penguasa. Pembicaraan ini membahas spekulasi politik yang diidentikkan dengan pemerintah, jenis, kewajibannya, dll. Masalah pemerintah, menurut Hassan Al-Banna, dimuat dalam buku-buku fiqih kami sebagai masalah kepercayaan dan ushul, bukan masalah furu'. Islam adalah kekuasaan dan pemerintahan, selain itu juga mengatur dan mendidik, sama halnya dengan hukum dan pemerataan. Salah satunya tidak bisa dibedakan dari yang lain.

Landasan pemerintahan Islam adalah wajib, seperti yang mereka katakan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama dan negara. Artinya, Islam dijatuhkan dengan membawa teks-teks yang mengontrol hubungan yang berbeda antara orang-orang dan pemerintah dengan orang-orang, kegiatan langsung, kerjasama, dewan dan aspek keuangan, memilih masalah dalam dan dunia, perang dan harmoni, kesepakatan dan harmoni, memutuskan hukum semua dekat dengan rumah dan masalah individu. bantuan sosial pemerintah, memelihara arisan berdasarkan kesetaraan, dan bantuan Bersama.

Ikhwanul muslimin menilai bahwa membangun pemerintahan Islam yang menjalankan kerangka Islam adalah kebutuhan yang tidak dapat diperdebatkan. Intinya mengakui kebebasan sosial yang dinamis, sekaligus mengakui otonomi politik. Sejak itu kita dapat membangun hidup kita di tempat dan tempat kita sendiri, tidak menggunakan milik orang lain. Premis keseimbangannya bukanlah teks syar'i, melainkan "pemeliharaan watak atau watak kelompok bebas".

Ikhwan mencirikan pemerintahan Islam sebagai pemerintahan yang otoritasnya adalah Muslim, melakukan komitmen Islam dan tidak secara transparan tunduk pada pembangkangan, dan konstitusi yang bergantung pada Al-

Qur'an dan Sunnah, khususnya menjalankan hukum Islam. Pertimbangan tentang sifat dan karakter pemerintahan Islam dapat ditekankan bahwa Ikhwan berpegang teguh pada kerangka parlementer yang mapan. Sesuai dengan Al-Banna, memang kerangka Islam tidak peduli tentang bentuk dan nama, selama aturan-aturan kunci yang tidak dapat dikelola oleh suatu pemerintahan tanpa diketahui.

2.2. Konsep dan Karakteristik Ikhwanul Muslimin

Kehadiran al-Banna dalam sejarah Mesir tidak dapat dipisahkan dari latar sosial-politik yang membersihkan Mesir saat itu. Dia bereaksi terhadap kondisi ini dengan ide dan perkembangan yang tidak kalah seriusnya dengan ide pembentukan kembali masa lalu. al-Banna sebagai pembaharu dalam Islam memiliki kekhawatiran khusus yang menggambarkan pendiriannya kembali. Di antara ruang yang menjadi perhatian adalah keyakinan, dakwah, pendidikan, masalah keuangan, masalah pemerintahan, dan sosial. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dan kehadiran dakwah al-Banna di kancah publik maka, pada saat itu, dan saat ini, sangat ideal untuk mempertimbangkan ini secara umum, untuk mengetahui misteri realitasnya. yang saat ini memiliki organisasi global, dan dengan harapan, gagasan pembangunan ini dapat dipadukan dengan perkembangan Islam kontemporer.

2.2.1. konsep akidah

Keyakinan Ikhwan al-Muslimin ini berasal dari strategi yang telah ditetapkan di suatu tempat di dekat Nabi Muhammad, yang tidak berubah untuk waktu yang sangat lama. Jadi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah adalah

strategi Ikhwan untuk beriman, yang ditunjukkan oleh pernyataan iman al-Banna adalah sesuatu yang harus diterima dengan hati-hati, dengan perasaan gembira. Terlebih lagi, akan muncul dalam diri kita suatu keyakinan yang tidak bercampur dengan pertanyaan. Untuk menyatukan Tuhan dengan hati dan membentengi keyakinan hati dengan jiwa yang tercermin dalam ciptaan-Nya.

2.2.2. konsep dakwah

Dakwah dari perspektif keseluruhan adalah ajakan untuk kebenaran dan kebaikan. Dakwah dalam pengertian ini tidak memiliki tempat dengan Islam saja, namun memiliki tempat dengan semua agama, sejujurnya berubah menjadi masalah utama untuk latihan ketat dari setiap pengikutnya. Dakwah al-Banna mengandung arti penting yang rumit, yang berarti perangkat, teknik, dan tujuan secara bersamaan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam gagasan pembangunan dan upaya-upayanya.

2.2.3. konsep pendidikan

Pendidikan adalah instrumen utama untuk pengakuan perubahan dan kemajuan individu. Sekitar saat itu di Mesir ada polaritas fungsional sekolah, khususnya: instruksi yang didanai negara diawasi oleh wilayah swasta. Diharapkan pembagian ini akan mendorong pemisahan antara informasi ketat dan informasi umum (sekuler). Sedangkan menurut al-Banna, Islam cukup mencakup semua perspektif yang saling terkait dan menyatu. Untuk mengantisipasi masalah ini, al-Banna memikirkan kemungkinan mendirikan sekolah khusus al-Ikhwan al-Muslimin dengan

rencana pendidikan yang terbatas sebagai pengembangan dari pemikiran itu, Madrasah al-Tahdzib didirikan di Ikhwan al- Muslimin, dengan rencana pendidikan yang memasukkan: materi Al-Qur'an, hadits, aqidah, kualitas etika, sejarah Islam dan tokoh salaf, latihan pidato.

2.2.4. konsep politik

Politik adalah ilmu kenegaraan, taktik. Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah atau dalam bahasa Inggris politics. Politik itu sendiri berarti pandai dan bijaksana. Memang percakapan kita sehari-hari seolah memaknai politik sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Inggris mulai menduduki Mesir pada tahun 1882. Akibat pendudukan ini terjadi gejolak dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain politik, sosial, ekonomi dan budaya. Masalah utama dan pertama yang dihadapi oleh rakyat Mesir adalah perolehan kemerdekaan dan perumusan dasar negara.

Pada saat yang sama, ada tiga teori yang ditawarkan dalam perumusan negara dasar. Ketiga teori tersebut adalah patriotisme, nasionalisme, dan Pan-Islamisme. Ketiga teori tersebut menginspirasi al-Banna untuk merumuskan sistem politik Mesir. Ide-ide patriotisme dan nasionalisme menurut al-Banna tidak bertentangan secara substansial dengan Islam. Menurut al-Banna, ciri-ciri patriotisme yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah: bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan, menimbulkan rasa kewajiban untuk membela diri (bangsa) dari penjajahan dan membuka wilayah Islam. Dengan demikian,

patriotisme al-Banna tidak dibatasi oleh batas-batas geografis, melainkan oleh kesetaraan agama.

Adapun karakteristik dan sasaran dakwah gerakan IKhwanul Muslimin yang diprakarsai oleh Hasan Al Banna mengatakan bahwa "ringkasnya, kita menginginkan terbentuknya individu yang berkepribadian muslim, rumah tangga muslim, kedaulatan islam, khilafah Islamiyah yang menghimpun segenap negara-negara islam, menaungi segenap kaum muslimin, mengembalikan kemuliaan mereka dan membebaskan tanah air mereka yang hilang dan dirampas. Kemudian membawa syiar jihad dan bendera dakwah Ilallah, sampai dunia seluruhnya sejahtera dengan terlaksananya ajaran Islam".

Selanjutnya Al Banna mengatakan "Camkan selalu bahwa kalian memiliki dua sasaran utama yaitu :

A. Membebaskan negeri-negeri Islam dari seluruh cengkraman pihak aggressor asing, sebab kemerdekaan merupakan hak setiap manusia yang tidak ada yang memungkirinya kecuali orang zalim dan durjana.
B. Hendaknya para negeri Islam yang bebas itu berdiri sebuah kedaulatan islam yang merdeka memberlakukan hukum islam, menerapkan sistem masyarakat islam, memproklamirkan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya ke seluruh manusia. Selama kondisi seperti ini belum terealisasi, maka kaum muslimin seluruhnya menanggung dosa dan bertanggung jawab

dihadapan Allah SWT. Disebabkan kelalaian mereka dan sikap diam mereka dari mewujudkannya.

2.3 Respon Pemerintah terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin

Pada era Gamal Abdul Nasser awalnya kelompok Ikhwanul Muslimin pro terhadap pemerintah, akan tetapi setelah revolusi Ikhwanul Muslimin menentang Presiden Gamal Abdul Nasser karena terbukti tidak berniat mendirikan negara islam di Mesir, tetapi justru mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab sekuler. Ketika hubungan dengan Ikhwanul Muslimin memburuk, pemerintah dan Ikhwanul Muslimin terlibat dalam peperangan sporadis (bersifat lokal) yang dalam beberapa kesempatan meledak menjadi tindak kekerasan. Akhirnya, pada tahun 1966, Nasser bertindak tegas menumpas ikhwanul Muslimin sampai keakar-akarnya, menghukum mati Sayyid Qutb, ideolog utamanya dalam dan tokoh-tokoh lain, menahan dan memenjarakan beribu-ribu orang , serta mengejar anggota lain hingga mereka bersembunyi atau lari ke pengasingan. Dan menjelang akhir jabatan Nasser, negara telah memblokir lembaga keagamaan dan membungkam oposisi islam termasuk Ikhwanul Muslimin.

Pada era Anwar Sadat, ia meraih kekuasaan ketika Arab mulai bangkit dari keterpurukannya tahun 1967 dan setelah kematian Nasser, Anwar Sadat sadar akan kondisi ini, sehingga ia berusaha membentuk identitas dan legitimasi politiknya sendiri. Memanfaatkan islam untuk menyingkirkan pengaruh kekuasaan kubu Nasser dan kelompok kiri. Namun kebijakan akomodatif Sadat tidak berlangsung lama, politik otoriter kembali menyelimuti Sadat dan penindasan terhadap para penentangnya semakin luas, termasuk para pengkritik

kebijakan-kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya. Tindakan keras ini mencapai puncaknya pada tahun 1981, ketika Sadat memenjarakan lebih dari 1500 orang dari berbagai lapisan masyarakat, aktivis islam, pengacara, dokter, wartawan, dosen, universitas, penentang politik dan mantan menteri pemerintahan. Penahanan-penahanan tersebut memicu perlawanan Islam yang semakin radikal, dan akhirnya berpuncak pada pembunuhan Anwar Sadat, pada 3 November 1981 oleh para anggota Jamaah al-Jihad ketika dia sedang meninjau parade militer memperingati perang 1973.

2.3.1. Letak Bangkitnya Ikhwanul Muslimin

Ibukota Kairo merupakan tempat yang lebih baik bagi Ikhwanul Muslimin untuk menyebar dengan cepat ke komunitas perkotaan Mesir lainnya. Pertemuan tersebut mengambil bagian penting dalam menetapkan program untuk jenis kelompok Ikhwanul Muslimin di masa depan. Lima pertemuan yang diadakan oleh Ikhwan mencerminkan latihan organisasi dari tahun 1932 hingga 1939. Pada pertemuan utama, organisasi Ikhwan mulai mendorong perkembangannya ke bidang politik publik dengan mengirim surat kepada Penguasa Fuad, di mana mereka mendorongnya untuk membatasi orang Kristen. Latihan pengkhotbah di Mesir. Pada pertemuan berikutnya yang diadakan pada tahun berikutnya 1934, Ikhwan memilih untuk 'mempromosikan' dengan mengeluarkan majalah minggu demi minggu (Majallat al-Ikhwan al-Muslimin dan Majallat al-Nadhir), yang merupakan suara organisasi. Pertemuan ketiga , yang diadakan di Walk 1935 adalah momen yang menentukan, karena 'pengelompokan pendaftarannya'. Ada proses pendaftaran tiga tingkat:

1) Mitra, bagi individu yang ingin bergabung, dengan hadiah berupa uang tunai dalam jumlah kecil,
2) Terkait, bagi masyarakat yang mendapatkan pelajaran dari perkembangan, dan
3) Dinamis, bagi individu yang fokus pada perkembangan baik secara nyata maupun filosofis.

Ziad Munson berpendapat bahwa siklus partisipasi ini adalah pembenaran mengapa Ikhwanul Muslimin menanggung penganiayaan politik lebih baik dari pada pertemuan kelompok di Mesir secara bersamaan. Karena bertambahnya jumlah kelompok Ikhwanul Muslimin, dan untuk mengajar dan menanamkan individu-individunya, organisasi itu membentuk liku-liku untuk persiapan atletik. Pada tahun 1937, mengikuti asal-usul pengembara, Ikhwan mendirikan 'legiun' sendiri yang kemudian berubah menjadi al-nizam al-khass (Perkumpulan Luar Biasa) dan al-jihaz al-sirri (Peralatan Misterius), dan memberikan kurikulum khusus dalam tangan ke tangan pertempuran dan teknik pertempuran. Saudara-saudara menggunakan brigade ini selama pemberontakan Badui di Palestina di suatu tempat di kisaran tahun 1936 dan 1939 melawan komando Inggris, yang memperluas latihan kelompok politik baik di dalam maupun di luar Mesir. Kongres kelima dari IKhwanul Muslimin pada tahun 1939, yang juga merupakan peringatan 10 tahun berdirinya kelompok, memiliki tempat yang luar biasa di seluruh keberadaan pembangunan. Di kongres inilah Hasan al-Banna menetapkan standar perkembangan isu-isu pemerintahan, yang akan mengungkapkan wawasan ke tahun-tahun mendatang:

1) Jenis Islam yang dipercaya oleh Saudara kandung menjadikan pemerintah sebagai fondasi penting dari program mereka;
2) Tanpa kemampuan untuk berakting, suara para pembaharu akan seperti "teriakan di alam liar";
3) Selanjutnya, menghindari misi kekuasaan legislatif adalah 'kejahatan Islam' Kakak beradik tidak mencari kekuatan untuk mereka dan siap menjadi 'pasukan' orang-orang yang mungkin mengkhawatirkan masalah ini secara Islami
4) Sebelum apapun bisa terjadi, harus ada periode di mana standar Saudara disebarkan.

Peristiwa perang besar kedua juga merupakan salah satu tokoh penting munculnya bantuan bagi kelompok Ikhwanul Muslimin dalam budaya Mesir, terutama setelah ketegangan yang meluas dari Inggris atas masalah legislatif. Mesir berada dalam situasi kritis bagi Inggris, karena perlu mendapatkan situasi geostrategis dalam Konflik dengan menahan Palung Suez melawan Hub Powers. Dalam isu-isu legislatif lokal Mesir pada tahun 1942, ada pertarungan untuk kontrol antara kastil, otoritas publik dan Inggris. Otoritas publik saat itu menjunjung tinggi kekuatan Hub dan ini mendorong Inggris untuk memaksa kastil mengubah otoritas publik. Ketegangan ini menghancurkan Partai al-Wafd, partai patriot paling mapan di negara ini, dan membangkitkan perasaan musuh Inggris di Mesir.

2.3.2. Pemikiran Ikhwanul Muslimin Mesir dan Radikalisme Islam

Pemikiran yang diterapkan oleh ikhwanul muslimin sebenarnya sudah benar sehingga tidak sedikit masyarakat Mesir yang mendukung mereka dalam berjuang melawan pemerintah negara yang tidak setuju dengan adanya penerapan salafiah. Ikhwanul Muslimin mampu berkembang dari waktu ke waktu, itu bisa dilihat dari menyebarnya secara luas kelompok ini ke berbagai penjuru kota dan mendapatkan banyak sambutan baik dari masyarakat Mesir yang juga mengedepankan aturan agama. Akan tetapi jika dilihat dari pegangan erat ikhwanul muslimin dimana mereka menyebarkan ajaran salafiah yang hanya mengedepankan Al-Qur'an dan Sunnah serta menjaga dari semua bentuk kemusyrikan duniawi dan kembali kepada Tauhid. Kehidupan umat islam harus diupayakan seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, selain apa yang tidak dilakukan itu merupakan hal yang bid'ah. Aliran yang didakwahkan oleh kelompok ini ialah ajaran yang dibawa oleh syeikh Muhammad Abdul Wahhab, Gerakan dakwah sanusiah dan Sayyid Rasyid Ridha. Akan tetapi disisi lain juga ajaran ini dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah yang bersambung dari mazhab Ahmad bin Hambal.

BAB 3

ANALISIS PELANGGARAN HUMAN SECURITY PEMERINTAH MESIR TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN

3.1. Analisis pelanggaran Human Security Era Gamal Abdul Nasser terhadap Ikhwanul Muslimin (1954-1970)

United Nations Development Programme (UNDP) membagi *Human Security* menjadi tujuh bagian diantaranya adalah *health security* (keamanan kesehatan), *economic security* (keamanan ekonomi), *food security* (keamanan pangan), *environmental security* (keamanan lingkungan), *community security* (keamanan komunitas), *political security* (keamanan politik), *personal security* (keamanan pribadi). Setelah perang dingin usai, UNDP menyatakan bahwa masalah keamanan bukan saja tentang militer dan perang akan tetapi juga menyangkut masalah kehidupan yang tercantum dalam tujuh bagian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis. (Persaud, 2013)

3.1.1 keamanan ekonomi

Pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser Mesir pernah mengalami krisis ekonomi. Disebabkan karena kebijakan zaman monarki yang kapitalistis dan memberi banyak peluang bagi berkembangnya feodalisme. Nasionalisasi terusan suez mempunyai dampak ekonomi bagi Mesir. Ada dua dampak ekonomi jangka pendek yang dihadapi oleh Mesir. Pertama ialah dibekukannya aset dan mata uang Mesir di Inggris, Prancis dan Amerika serikat. Kedua ialah adanya embargo ekonomi dari Inggris yang merupakan mitra dagang paling penting bagi

Mesir. Terlebih lagi terjadinya pemblokiran Terusan Suez dari November 1956 hingga April 1957 yang semakin memperburuk perekonomian negara Mesir.

Tahun 1951 juga krisis ekonomi terjadi di Mesir. Harga barang naik, demikian pula jumlah pengangguran. Kekacauan ekonomi ini memunculkan kemarahan rakyat. Ikhwanul Muslimin dan Partai Komunis turun ke jalan mengadakan berbagai aksi protes. Para pekerja di perusahaan pengelola terusan Suez melakukan mogok kerja. Pemprotes bahkan mulai menyerang pasukan Inggris yang ditempatkan di sekitar terusan Suez. Kekacauan ini menjadi momentum bagi Perwira Bebas untuk melakukan kudeta.

3.1.2 keamanan politik

Nasser setelah terpilihnya menjadi Presiden dan berkuasa ia tidak setuju dengan komunisme atau marxisme orthodox. Ia juga juga tidak setuju dengan sistem pemerintahan Islam. Gamal Abdul Nasser menampilkan nasionalisme Arab dalam upaya pembebasan dari penjajahan dan dominasi Asing, dalam mewujudkan perubahan sosial masyarakat ia menampilkan paham sosialisme Arab. Nasser menyadari bahwa bangsa Arab tidak dapat dilepaskan dari Islam, namun baginya Islam hanyalah bagian dari identitas budaya masyarakat Mesir. Bagi Nasser yang cenderung sekuler Islam justru dapat menjadi ganjalan ideologis apabila ditempatkan pada posisi sentral dalam masyarakat. Revolusi yang digulirkan Nasser bersama teman perwira yang lain juga melibatkan orang-orang dengan paham politik yang berbeda. Selain perwira yang menganut paham nasionalis, di dalamnya juga terdapat perwira-perwira yang berpaham marxis. Di antara mereka ada pula yang menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Meski

demikian pada akhirnya Nasser menyingkirkan teman-teman yang berbeda pendapat dengannya, bukan hanya mereka yang menjadi anggota Ikhwanul Muslimin atau penganut Marxisme tetapi hampir semua kawannya yang terlibat dalam Revolusi.

3.2 Analisis pelanggaran Human Security Anwar Sadat terhadap Ikhwanul Muslimin (1970-1981)

Unit Nations Development Programme (UNDP) membagi *Human Security* menjadi tujuh bagian diantaranya adalah *health security* (keamanan kesehatan), *economic security* (keamanan ekonomi), *food security* (keamanan pangan), *environmental security* (keamanan lingkungan), *community security* (keamanan komunitas), *political security* (keamanan politik), *personal security* (keamanan pribadi). Setelah perang dingin usai, UNDP menyatakan bahwa masalah keamanan bukan saja tentang militer dan perang akan tetapi juga menyangkut masalah kehidupan yang tercantum dalam tujuh bagian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis. (Persaud, 2013)

3.2.1 Keamanan ekonomi

Ketika anwar sadat sudah resmi menjadi presiden Mesir, ia mulai berkonsentrasi membangun perkembangan ekonomi Mesir. Pada tanggal 6 Oktober 1973 ia memulai membangun jembatan, hotel-hotel berbintang, jalan tol dan bangunan megah lainnya. Anwar sadat mampu meyakinkan para investor dari dalam negeri dan negara-negara teluk untuk membangun kembali Kairo sebagai

kota yang modern. (Misrawi, Menara Ilmu, Reformasi danKiblat Keulamaan, 2010)

Mesir juga sudah mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja dampak dari perjanjian Camp David. Ia dikeluarkan sebagai anggota liga Arab dan markas pusat Liga Arab dipindahkan dari Kairo ke Tunis. Mesir bukan saja mengalami isolasi politik, melainkan juga dibekukannya sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro dolar Arab.

3.2.2 Keamanan Komunitas

Pada pemerintahan Anwar Sadat ia mulai membuka diri untuk memulai hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat pada tahun 1973. Mengetahui Sadat memulai perdamaian dengan Israel pada bulan Maret 1979, mahasiswa islam mengadakan demonstrasi di jalan-jalan sepanjang kota Alexandria. Tujuan demonstrasi itu antara lain adalah "tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada hak istimewa bagi orang kaya, akhiri dekadensi moral, dan tidak ada pemisahan antara Islam dan negara".

Usaha penolakan Mahasiswa terhadap kebijaksanaan Sadat untuk mengadakan perdamaian dengan Israel tidak cukup hanya demontrasi, tetapi ditambah juga dengan usaha menyebarluaskan lewat mass media. Dalam majalah al-Da'wa misalnya ditulis "mustahil hidup berdamai dengan Israel".

Tidak hanya Mahasiswa, kelompok Ikhwanul Muslimin juga lewat al Da'wa menuduh Sadat menjual kemerdekaan Mesir kepad Amerika, sama dengan apa yang dilakukan Nasser kepada Soviet. Ikhwanul Muslimin adalah kelompok

vokal mengkritik kebijaksanaan Sadat. Mereka tidak bosan-bosan mengkritik ketidakbecusan kepemimpinan Saat. Tanpa menyebut nama Sadat secara langsung, mereka menyebut sebagai pemerintahan yang tidak islami, pemerintahan yang korup.

3.2.3 Keamanan Pribadi

Hubungan baik antara Anwar sadat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin tidak berlangsung lama, ia memiliki rasa kekhawatiran terhadap ikhwanul muslimin. Bisa dilihat dengan pengumuman bahwa pemerintah tidak mengizinkan pembentukan partai Islam, padahal ketika baru terpilih menjadi Presiden baru Mesir setelah Nasser ia memberi kebebasan mendirikan partai. Akibatnya terjadilah demonstrasi dan unjuk rasa yang berkepanjangan, yang bukan saja mendemonstrasikan dan proses terhadap dampak negatif dari kebijaksanaan keterbukaan, yakni semakin banyaknya jumlah klub-klub malam, pelacuran, judi, penjualan alkohol dan semacamnya. Sebab dengan kebijaksanaan Sadat ini juga membuka liberalisasi kaum perempuan. Pada tahun 1979 misalnya Sadat mengumumkan bahwa 30 wakil di DPR harus wanita, adanya pembatasan yang baru tentang cerai dan poligami. Kebijaksanaan ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

3.2.4 Keamanan Politik

Mesir pada era Anwar Sadat mengalami ketertinggalan dari berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, keadilan, kepedulian, ekonomi dan lain sebagainya. Maka dari itu tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan Al Banna memiliki tujuan untuk menjadikan Negara Mesir menjadi lebih baik dan

maju yang didasarkan pada nilai Islam. Sebab berdasarkan bukti sejarah, dengan pendekatan modernisme menurut Al Banna ternyata tidak mampu mengangkat derajat dan kondisi masyarakat Mesir menjadi lebih baik. Menurut kacamata Al Banna, apa yang terjadi di Mesir malah justru sebaliknya, korupsi merajalela, kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin melebar, keadilan tidak pernah tercipta. Dengan demikian, ada dua kerugian yang muncul pada masyarakat Muslim Mesir. Pertama, kehilangan nilai-nilai agama karena pengaruh budaya barat, yang pada gilirannya menciptakan prajurit-prajurit yang tidak bermoral. Kedua, dominasi orang luar terhadap Mesir menjadi semakin menguat. Akibatnya , ketergantungan terhadap orang lain semakin besar pula. Apa yang dikatakan Al Banna ini juga terbukti ketika melihat bagaimana ketergantungan Mesir terhadap Uni Soviet di masa Nasser dan Amerika Serikat pada periode sesudahnya sampai sekarang.

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Hasan Al Banna merupakan tokoh besar muslim dari Mesir, pandangannya terhadap hukum dan ajaran Islam bersifat universal dalam mengatur seluruh kehidupan manusia baik hal ibadah maupun duniawi. ia memperjuangkan harapan, cita-cita dan berbagai pemikirannya kedalam Ikhwanul Muslimin. melalui gerakan tersebut ia berupaya menegakkan kembali khilafah islamiyyah.

Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan salah satu gerakan yang berada di Mesir. kelompok ini bertujuan untuk merubah Mesir menjadi negara yang mayoritas Islam dan berlandaskan Al-Qur'an untuk standar kehidupan dalam keluarga, masyarakat dan pemerintahan negara. Tetapi kelompok ini juga kerap sering menjadi penghalang bagi pemerintah karena cara pikir pandang yang berbeda, sehingga pada akhirnya seringkali terjadi konflik antara kelompok Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir. salah satu nya ialah ketika Era Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.

di era pemerintahan Gamal Abdul Nasser terjadi pelanggaran-pelanggaran Human Security kepada kelompok Ikhwanul Muslimin karena memperjuangkan tujuan mereka untuk melihat negara Mesir menjadi negara Islam. sehingga banyak orang Ikhwanul Muslimin yang dipenjarakan karena melawan pemerintah negara.

di era Anwar Sadat ikhwanul Muslimin awalnya setuju dengan tujuan sadat yaitu ingin menjadikan Mesir menjadi negara Islam. akan tetapi tidak lama

Ikhwanul Muslimin menentang kepada Anwar Sadat karena ia mulai bekerja sama dengan negara barat yaitu Amerika Serikat. sehingga ini awal dari terjadinya perselisihan antara anwar sadat dengan Ikhwanul Muslimin dan pada saat Sadat melakukan pidato didepan rakyat Mesir, ia di bunuh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin.

2.2 Rekomendasi

berdasarkan dari analisis tersebut, dalam penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan penulis dalam meneliti sebuah isu yang diteliti. dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti beberapa analisis pelanggaran Human Security yang dilakukan Pemerintah Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin era Gamal Abdul Nasser yaitu keamanan ekonomi dan keamanan politik. masih ada lima keamanan lagi yang belum dicantumkan di dalam penelitian ini sehingga tidak semuanya masuk kedalam analisis era Nasser ini. sedangkan di analisis pelanggaran Human Security yang dilakukan Pemerintah Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin era Anwar Sadat menjelaskan keamanan keamanan ekonomi, keamanan komunitas, keamanan pribadi, dan keamanan politik. ada tiga poin lagi yang belum dijelaskan pada penelitian ini karena keterbatasan peneliti dalam mencari sumber dan jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

Abied, Aunul Shah M. et al. 2001. Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah. Cet. I. Mizan: Bandung.

Sagif, David, Fundamentalism and Intelectuals in Egyp (1973-1993), London: Frank Case, 1995.

Yakan, Fathi, Revolusi Hassan al-Banna; Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Quthb sampai Rasyid al-Ghannusyi Jakarta: Harakah, 2002

Sabaruddin Hussein. (2012). Perang Arab Israel Selagi Belum Kiamat. Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd.

Raphael Israeli & Carol Bardenstein. (1985). Man of Defiance A Political Biography of Anwar Sadat. New Jersey: Barnes & Noble Books.

P. J. Vatikiotis. (1969). The History of Egypt. London: Butler & Tanner Ltd.

Shamsul Azhar yahya, et.al. "Tahalluf Siyasi Dalam Perjuangan Ikhwan Al-Muslimin di Mesir, 1970-1981". Jurnal Hadhari Edisi Khas 14.

Raphael Israeli & Carol Bardenstein. (1985). *Man of Defiance A Political Biography of Anwar Sadat*. New Jersey: Barnes & Noble Books.

Raymond William Baker. (1978). Egypt's Uncertain Revolution Under Nasser and Sadat. London: Harvard University Press.

Jon B. Alterman. (1998). Sadat and His Legacy Egypt and The World 1977-1997. Washington, Washington Institute for Near East Policy.

Abouzahr, Miriam, Egyptian Social Services, Senior Honors Theses, Eastern Michigan University, 2006

Munson, Ziad, Islamic Mobilization : Social Movement Theory and the Egyptian Moslem Broterhood, The Sociological Quarterly, Vol. 42 No.4, Department of Sociology, Harvard University, 2001

Kepel,Gilles, The Brotherhood In The Salafist Universe, Current Trend In Islamist Ideology, Vol. 6, Hudson Institute, 2008

Robinson, Stephen, Political Process Model of Hybridization : The Muslim Brotherhood and the Free Officers' Legacy, 2011

Davidson, Charles Robert, Political Violence In Egypt: A Case Study Of The Islamist Insurgency 1992-1997, The Fletcher School of Law and Diplomacy, 2005.

Ziad Munson, "Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood," Sociological Quarterly 42, no. 4 (September 2001) 501

Brynjar Lia, *The Society of Muslim Brotherhood in Egypt; The Rise of an Islamic Mass Movement 1928-1942*, (Ithaca Press, 2010), 256-258.

Farouk of Egypt, (diunduh pada 18 maret 2021); dari http://wikipedia org/wiki/Farouk of Egypt.

Richard Paul Mitchell, *Masyarakat Al Ikhwan Al Muslimun : Gerakan Dakwah Al Ikhwan Di Mata Cendekiawan Bara*", op. Cit, hal 125.

Hemawati, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.170

Tian Anwar Bahtiar, *Hamas kenapa Dibenci Israel*, (Jakarta: Hikmah. 29), h.90

Mohammed Heikal, *Anwar Sadat: kemarau kemarahan,* Terj, Arwah Setiawan, (Jakarta: Temprin, 1986), h. 45

Misrawi, Zuhairi, *Al-Azhar: Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Keulamaan,* Jakarta: Kompas, 2010